

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan

Muhammad Wahyuddin

Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

Abstract: This research was aims to analyze and describe Evaluation of Implementation the Medium Term Development Plan (RPJMD) of Berau Regency Year 2010-2015 of Education and Health. The focus of the research are: medium-term development plan in the field of Education and the medium-term development plan in the field of health. The research data obtained through interview, observation and documentation. The results of this study illustrate the implementation of educational programs in accordance with what is stated in the document RPJMD Berau District on 4 programs implemented according to priority.

Keywords : Evaluation, RPJMD, Education and Health.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan, melalui fokus penelitian yaitu : (1) Rencana pembangunan jangka menengah dibidang Pendidikan, (2) Rencana pembangunan jangka menengah dibidang kesehatan. Data penelitian didapatkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian data-data tersebut penulis menganalisa menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program-program pendidikan sesuai dengan apa yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Berau dengan dilaksanan sesuai dengan 4 program prioritas.

Kata Kunci : Evaluasi, RPJMD, Pendidikan dan Kesehatan.

Pembangunan wilayah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Amanat peraturan dan perundang-undangan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan menyusun perencanaan tahunan sekaligus penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan. RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, yang di dalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana-rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Berau, yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2010. RPJMD Kabupaten Berau tahun 2011-2015 adalah tahapan rancangan pembangunan 5 tahunan kedua dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Berau 2006 – 2026, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”, sehingga Visi RPJM Daerah 2011 – 2015 sebagai rangkaian dalam perwujudan Visi RPJP Daerah 2006 - 2026. Penyusunan RPJM Daerah didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang meliputi berbagai potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2011-2015. Selain itu, RPJMD Kabupaten Berau juga merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dan RKPD, serta sekaligus merupakan arah kebijakan program/kegiatan pembangunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Berau secara berjenjang.

Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Publik

Pasolong (2007:38) mengemukakan bahwa pada dasarnya terdapat perbedaan antara konsep “kebijakan” dan “kebijaksanaan”. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dan lain-lain. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai macam alternatif, sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh *person pejabat* yang berwenang.

Mengenai pemaknaan kebijakan dan kebijaksanaan, Ndraha (2003) menerangkan bahwa pernah terjadi polemik tentang terjemahan konsep *policy* dalam bahasa Indonesia. Didalam bahasa Indonesia terdapat ragam bahasa dan ungkapan Indonesia seperti bijak-lestari, arif-bijaksana, dan lain-lain. Arif-bijaksana yang dianggap identik dengan kata bijak, dijadikan padanan *policy*. Sementara itu, kebijaksanaan dalam pemakaian sehari-hari “tercemar” maknanya, dicemari dengan nilai negatif, menjadi bijaksana-bijaksini (korupsi). Selanjutnya Ndraha meluruskan kembali pemaknaan kebijakan dan kebijaksanaan sesuai dengan porsinya. Kata bijaksana dikembalikan pada pasangannya arif-bijaksana. Sedangkan kata kebijaksanaan yang telah tercemar ditandai dengan tanda kutip: “kebijaksanaan”. Jadi sistem nilai kearifan menjadi sumber dari dua subsistem nilai kebijakan untuk *policy*, yaitu pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi akto atau lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

Menurut Suharto (2008), kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *Government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *Governance* yang menyentuh pengelola sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk masyarakat atau warga negara.

Setiap kebijakan publik memerlukan evaluasi. Proses evaluasi dimaksudkan untuk menguraikan dan memahami dinamika internal berjalannya suatu program, dimana proses evaluasi selalu memerlukan deskripsi rinci tentang berjalannya suatu program. Menurut Suharto (2005) evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Dengan kata lain, evaluasi adalah mengukur berhasil tidaknya program yang dilaksanakan, apa penyebabnya program ini berhasil dan penyebab gagalnya proram ini serta bagaimana cara menindaklanjutinya.

Jika evaluasi dikaitkan terhadap pengukuran kinerja dan efek suatu program dalam menacapai tujuan yang ditetapkan, maka sangat erat kaitannya dengan tercapainya *outcome* dan adanya *impact* dari suatu program. *Outcome* adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas yang dibandingkan dengan hasil yang diharapkan (tujuan awal) dari pelaksanaan program tersebut, dan *impact* adalah dampak berupa efek langsung dan tidak langsung atau konsekuensi yang diakibatkan dari pencapaian tujuan program, yang diukur dengan membandingkan antara hasil program dengan perkiraan keadaan yang akan terjadi apabila program tersebut tidak ada (Mahmudi 2005).

Berdasarkan hal tersebut, pengukuran kinerja sendiri menurut Mahmudi (2005) merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi, dalam hal ini penilaian masyarakat terhadap kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Pengukuran kinerja didesain untuk memonitor

implementasi rencana-rencana organisasi, menentukan kapan rencana tersebut berhasil dan bagaimana cara memperbaikinya.

Perencanaan Pembangunan

Menurut George R. Terry dalam Riyadi dan Brantakusumah (2004), perencanaan merupakan upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Y. Dror dalam Riyadi dan Brantakusumah (2004) menyatakan perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan dalam waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Diana Conyers dan Peter Hills dalam Riyadi dan Brantakusumah (2004), mengemukakan "*Planning is a continuous process which involves decisions, or choices, about alternative ways of using available resources, with the aim of achieving particulars goals at some time in the future.*" Artinya bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa yang akan datang.

Menurut Adri Patton (2004), pembangunan meliputi beberapa pengertian antara lain; *Pertama*, bahwa pembangunan itu harus merupakan suatu proses. Dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam pelaksanaan perencanaannya dapat diatur berdasarkan atas skal prioritas dan tahapn-tahapan tertentu. *Kedua*, bahwa pembangunan itu harus merupakan usaha-usaha yang dilakuka secara sadar. Artinya bahwa setiap usaha pembangunan harus dilandasi dengan motivasi dasar, sasaran dan tujuan yang jelas dan rasional dengan kata lain tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran emosional. Pembangunan harus dilakukan secara teratur, dalam arti harus berencana dan berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan. *Ketiga*, bahwa pembangunan itu baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, harus sedemikian rupa mengarah kepada modernitas. Artinya harus membuahakan suatu perubahan dan hasil bagi masyarakat luas yaitu suatu bentuk cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya termasuk prospek pengembangan potensial dan sumber kehidupan dimasa depan. *Keempat*, bahwa sifat dan watak modernisasi yang akan dicapai itu harus sedemikian bercirikan multidimensional. Artinya harus mencakup semua aspek kehidupan. Pada akhirnya harus ada kesadaran, bahwa semua hal yang telah disebut diatas semata-mata ditentukan demi usaha pembinaan bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Perencanaan pembangunan hendaknya bersifat dapat dilaksanakan (implementatif) dan dapat diterapkan (aplikatif). Oleh karena itu dalam penyusunan perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang

kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan. Menurut Riyadi & Brantakusumah (2004) mengatakan sebagai berikut perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman, acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Bidang Pendidikan

Anggaran pendidikan di Kabupaten Berau memiliki jumlah besaran yang berbeda tiap tahunnya. Pada Tahun 2011, total anggaran untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp.350.882.854.562 dan terserap sebanyak 85 %. Sedangkan pada tahun 20012 total anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sebesar Rp. 448.014.237.604,16 dengan realisasi belanja Dinas Pendidikan mencapai 74,45 % dari total anggaran atau setara dengan Rp. 333.568.654.780,00. Pada tahun 2013 terjadi penurunan untuk total anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, yaitu sebesar Rp. 317.837.641.032.00 realisasi belanja Dinas Pendidikan mencapai Rp 208.875.343.029 atau 65.72% dari total anggaran.

Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 Bidang Pendidikan terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Berau, salah satunya adalah program PAUD di Kabupaten Berau. Jumlah PAUD tahun 2011 di Kabupaten Berau sebanyak 39 buah dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 48 buah. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah PAUD mencapai 56 buah, di Kabupaten Berau memiliki PAUD untuk membimbing anak-anak usia dini untuk belajar. Dimana berdasarkan banyaknya jumlah siswa pada jenjang usia 4-6 tahun sebanyak 13.859 orang berbanding jumlah anak usia 4-6 tahun yang sebesar 14.048 orang anak. Dari hasil perbandingan tersebut dapat dilihat hanya 189 dari jumlah anak usia 4-6 tahun yang tidak bersekolah.

Untuk dapat menghasilkan siswa PAUD yang berkualitas, selain ditunjang masalah infrastruktur juga berkaitan dengan tenaga pendidik. Kualitas tenaga pendidik berpengaruh langsung terhadap proses belajar mengajar di PAUD. Perkembangan jumlah sekolah PAUD belum bisa diimbangi dengan tingkat kualitas pendidik itu sendiri, dimana masih banyak ditemui guru PAUD yang berlatar pendidikan SMA hingga SMP. Peningkatan kualitas tenaga pendidik ini bertujuan untuk mengimbangi jumlah murid PAUD itu sendiri. Dimana diperlukan tenaga pendidik PAUD yang berlatar pendidikan PAUD itu sendiri, sehingga diperlukan peningkatan untuk tenaga pendidik yang berlatar belakang SMA bahkan SMP. Sehingga kedepannya dapat meningkatkan standar PAUD di Kabupaten Berau serta hasil yang didapatkan adalah anak-anak usia dini yang berkualitas.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan salah satu program yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2010-2015. Dimana sasaran dari program ini adalah untuk meningkatkan jumlah anak-anak

di Kabupaten Berau untuk mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun. Faktor pendidikan dasar merupakan kunci peningkatan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Sekolah Dasar hingga SMP baik negeri ataupun swasta tahun 2011 sebanyak 204 unit. Pada tahun 2012 berkembang menjadi 210 unit hingga sampai dengan tahun 2013 terjadi peningkatan dengan tercatat sebanyak 217 unit sekolah. Selanjutnya untuk jumlah murid dari SD sampai dengan SMP pada tahun 2011 sebanyak 35.991 siswa, sedangkan pada tahun 2012 menjadi 35.726 siswa dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebanyak 36.779 siswa. Kemudian untuk tenaga pendidik tahun 2011 sebanyak 2.053 orang, tahun 2012 meningkat 2.605 orang dan meningkat jumlahnya menjadi 2.798 orang pada tahun 2013.

Program Pendidikan Non Formal

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan non-formal di Kabupaten Berau sudah berjalan dengan baik, dengan masih adanya catatan kekurangan yang kedepannya dapat diperbaiki. Dapat kita lihat dimana hanya terdapat satu lembaga PKBM yang berdiri tahun 2011 kemudian belum ada lagi tumbuhnya lembaga serupa. Pendidikan Keaksaraan yang baru terlaksana di tahun 2013. Kemudian kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang baru terlaksana pada tahun 2012 dan 2013, padahal kegiatan ini dapat berguna dengan baik di masyarakat. Setiap masyarakat minimal melewati pendidikan selain formal maka dapat melewati pendidikan non formal. Tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Jadi setiap manusia wajib berpendidikan sebagaimana mestinya baik formal maupun non formal agar dapat melangsungkan hidupnya secara layak.

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, secara umum realisasi pencapaian sasaran terhadap indikator kinerja pada guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dapat direalisasikan hingga persentasenya mencapai 77,35%. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan antara jumlah guru berijazah S1/D-IV sebanyak 2.135 orang dengan jumlah guru sebanyak 3.530 orang yang ada di Kabupaten Berau pada tahun 2013.

Dari hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan, Diknas Kabupaten Berau telah melaksanakan program yang telah tercantum dalam dokumen RPJMD ini dengan mengagendakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan kurun waktu 200-2013. Tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan, dimana untuk dapat memenuhi mutu pendidikan yang layak, maka harus dipenuhi terlebih dahulu kualitas tenaga pendidik serta infrastruktur pendidikan baik yang utama maupun pendukungnya. Karena dalam hal ini kualitas tenaga pendidikan akan berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Bidang Kesehatan.

Untuk menjalankan program bidang kesehatan yang sudah ada, Pemkab Berau memberikan anggaran kepada Dinas Kesehatan yang nilainya meningkat dari

tahun 2011 hingga tahun 2013. Pada tahun 2011 anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sebesar Rp. 92.068.550.558,-. Kemudian pada Tahun 2012 total anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sebesar Rp.107.014.237.604,-. Kemudian terjadi peningkatan anggaran belanja pada tahun 2013 sebesar Rp. 119.783.413.626,-

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pemkab Berau untuk menekan angka kematian baik ibu, balita dan anak bayi sudah dilakukan secara berkelanjutan mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 ini sampai dengan target akhir yaitu di tahun 2015. Hal ini sesuai dengan program yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Berau. Hasil dari program ini dapat kita lihat dimana angka kematian bayi serta balita mengalami penurunan pada tahun 2013 dibanding dengan tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa program kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik. Tetapi khusus untuk angka kematian ibu, justru terjadi peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan tambahan buat Pemerintah Kabupaten Berau untuk dapat menekan hingga ke titik terendah pada tahun 2015 yang akan datang. Pencapaian derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Berau pada tahun 2013 dalam pelaksanaan program dan kegiatan mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan angka-angka penurunan kasus-kasus kematian bayi maupun balita serta meningkatnya umur harapan hidup dibandingkan tahun sebelumnya tidak terlepas dari berbagai upaya pembangunan kesehatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat.

Jumlah Posyandu pada tahun 2011 sebanyak 223 buah dengan jumlah kader sebanyak 2.016 orang, sehingga ratio kader terhadap posyandu sekitar 9,02 kader per posyandu. Kemudian pada tahun 2012 bertambah jumlahnya menjadi 230 buah dengan jumlah kader mencapai 2.085 orang dengan rasio sebesar 9,06 per posyandu. Pada tahun 2013 pertambahan posyandu menjadi 235 buah dengan peningkatan kader mencapai 2.115 orang dengan rasio sebesar 9 per posyandu.

Melihat data diatas dan hasil penelitian, menunjukkan bahwa program ini telah berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Terjadi peningkatan jumlah Posyandu mengindikasikan bahwa peran pemerintah dalam menyediakan posyandu berjalan dengan baik, hal ini direspon juga dengan masyarakat dengan bertambahnya jumlah kader dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukan peran serta masyarakat dibidang kesehatan semakain meningkat khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dalm hal ini adalah keterlibatan mereka di posyandu. Selain itu terdapat pula Posyandu program tambahan yaitu Posyandu Usila (Usia Lanjut), Posyandu Bina Kelompok Balita dan Posyandu Pengawasan Anak Usia Sini 3 Buah. Selain ini, kegiatan Desa siaga juga digalakkan untuk memberdayakan masyarakat dibidang kesehatan. Dimana desa siaga tersebar di 13 Puskesmas dengan jumlah kader 1.016 orang sehingga ratio kader terhadap desa siaga adalah 12 per desa

siaga. Pada tahun 2013 dari 110 Kelurahan /Kampung (desa siaga), terdapat 44 desa siaga aktif.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Berau telah melaksanakan program kesehatan yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Berau beserta kegiatan-kegiatan didalamnya yang dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ditempuh dengan upaya pembangunan puskesmas untuk dapat mencakup seluruh wilayah. Meskipun pada kenyataannya dilapangan masih belum dapat mencakup masyarakat secara keseluruhan. Dinas Kesehatan harus mampu memberdayakan puskesmas dan puskesmas pembantu secara maksimal karena sebagai beranda depan layanan kesehatan di daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan Berau sehat. Sebab pelayanan kesehatan tidak bisa ditunggu-tunggu seiring dengan tingginya permintaan warga memperoleh layanan kesehatan, karena masih adanya aduan masyarakat terhadap lemahnya kinerja pelayanan kesehatan pedesaan terlebih lagi pedalaman. Untuk itu optimalisasi pelayanan kesehatan telah dilakukan. Baik evaluasi kinerja seluruh pos pelayanan dan infrastruktur.

Faktor Penghambat Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan tahun 2011-2013.

Sumber Daya Manusia

Meski seluruh kecamatan di Kabupaten Berau kini sudah terbangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas, namun persolan klasik kurangnya tenaga kesehatan seperti dokter dan analis kesehatan masih terus diupayakan penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga Dinas Kesehatan mulai menjadikan pelayanan kesehatan pedesaan menjadi fokus kerja disamping mengatasi keluhan masyarakat akan jauhnya tempat berobat dan target utama program kesehatan lainnya.

Infrastruktur

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor infrastruktur benar-benar berpengaruh terhadap baik tidaknya pelaksanaan program-program pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pendidikan menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Berau untuk selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dengan terus ditingkatkan pembangunan dan infrastruktur pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang terus mendukung pembangunan yang ada, dengan cara menjaga dan memelihara pembangunan yang sudah dilakukan. Dengan kata lain semakin banyak pembangunan infrastruktur, maka kemungkinan meningkatkan tingkat kesehatan, pendidikan serta perekonomian masyarakat di daerah terpencil makin besar. Namun sayang kenyataan di lapangan hal ini masih menjadi hambatan di daerah dalam meningkatkan dan mensukseskan program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :

1. Pelaksanaan program-program dibidang Pendidikan dan bidang Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 dilaksanakan sesuai dengan pemilihan program prioritas. Dalam penelitian ini terdapat 4 program Pendidikan dan 3 Program Kesehatan yang dibahas. Dimana dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Pelaksanaan program-program dibidang Pendidikan dan bidang Kesehatan tahun pelaksanaan 2011-2013 sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam RPJMD Kabupaten Berau. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemui masalah-masalah yang bisa menghambat progres pelaksanaan program-program yang ada.
3. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 khususnya bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan yaitu; Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara dua hal ini memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan program kerja yang telah disusun dalam RPJMD khususnya di bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan sebagai sebuah saran dan masukan pihak Kecamatan Gunung Tabur yaitu :

1. Perlunya pengawasan yang lebih baik lagi bagi Pemerintah daerah Kabupaten Berau untuk dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan program-program yang sedang dilaksanakan khususnya di bidang Pendidikan dan Kesehatan.
2. Perlunya bagi pemerintah daerah Kabupaten Berau untuk dapat meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) pada dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan semangat kerja mereka.
3. Perlunya bagi Pemerintah kabupaten Berau untuk meningkatkan infrastruktur dasar di daerah seperti jalan, jembatan serta infrastruktur yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan dan kesehatan, seperti bangunan sekolah, laboratorium kerja, puskesmas baik yang rawat inap maupun yang skala kecil dan lain-lain. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Berau khususnya mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.

Daftar Pustaka

- Effendi, Bachtar. 2009. *Pembangunan daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Uhaindo Media dan Offset.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi dan Metodologi: Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

- Pasolong, Harbani. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Patton, Adri. 2004. *Peran Informal Leader Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbatasan Kabupaten Malinau*. Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Kekhususan Ilmu Manajemen Publik. Malang.
- Siagian, Sondang, P. 2000. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT.Bumi Aksara
- _____. 2000. *Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subarsono, AG. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.